

MENDAPAT TUGAS KHUSUS

Dari Enam Presiden RI

Kemampuan komunikasi dan lobi politik yang terasah di organisasi kepemudaan, khususnya HMI dan AMPI, memudahkan Nurdin Halid 'berselancar' di panggung politik nasional. Ia diakui sebagai seorang pelobi ulung oleh rekan-rekan sesama politisi maupun pemerintah yang berkuasa.

Kemampuan komunikasi dan lobi itu pulalah yang membuat Nurdin Halid kerap mendapat tugas khusus dari elit Partai Golkar. Yang paling fenomenal tentu bagaimana Nurdin Halid mendapat amanat khusus dari lima presiden RI, dari Presiden Soeharto hingga Presiden Jokowi.

Perkenalan dengan Presiden Soeharto terjadi ketika Nurdin Halid sukses membesarkan bisnis Puskud Hasanuddin sehingga kepercayaan dari Tommy Suharto yang saat itu menjabat Kepala BPPC (Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh). Hubungan baik antara Nurdin Halid dan Tommy Suharto, pemilik PT Goro terlihat tatkala Tommy Suharto mengizinkan Nurdin Halid selaku Dirut Puskud mendirikan Perkulakan 'modern' Goro di Makassar. Pasca Reformasi 1998, setelah Soeharto jatuh, bisnis cengkeh petani ini justru menyeret Nurdin ke meja hijau.



Nurdin Halid dan Presiden RI ke-2, Soeharto.

Nurdin Halid juga pernah mendapat tugas khusus dari Presiden BJ Habibie untuk menurunkan harga minyak goreng yang melambung tinggi pada awal Reformasi 1998. Nurdin Halid sebagai Ketua Koperasi Distribusi Indonesia berhasil menjalankan misi pemerintahan Presiden Habibie: harga minyak goreng turun dari Rp9.000,00 ke Rp3.500,00. Seperti dalam kasus cengkeh, sukses Nurdin menurunkan harga minyak goreng untuk

kepentingan rakyat banyak justru menjeratnya dalam kasus hukum.



Nurdin Halid dan Presiden RI ke-3, BJ Habibie.

Presiden Gus Dur pernah meminta bantuan Nurdin Halid tatkala berada dalam tekanan hebat akibat dinamika politik di Senayan. Entah siapa yang merekomendasikan kepada Gus Dur, Nurdin Halid dipanggil menghadap Presiden RI ke-3 itu di sebuah hotel sekitar Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan terbatas itu, Nurdin Halid diminta oleh Gus Dur untuk melobi beberapa fraksi di DPR untuk meredakan suhu politik saat itu.



Nurdin Halid dan Presiden RI ke-3, Gus Dur.

Penerus Gus Dur, Presiden Megawati Soekarnoputri juga pernah meminta bantuan khusus kepada Nurdin Halid. Melalui Rini Soemarno, Menteri Perdagangan saat itu, Nurdin Halid diminta bantuan untuk meredam fraksi-fraksi di DPR yang mempersoalkan pembelian pesawat tempur Shukoi dari Rusia yang berpotensi pada pemakzulan terhadap Presiden Megawati. Atas keberhasilan Nurdin melobi fraksi-fraksi di DPR, Inkud yang dipimpin Nurdin Halid mendapat jatah impor gula. Tragisnya, misi Inkud pimpinan Nurdin Halid mendistribusikan kebutuhan pokok rakyat berujung pada jeruji besi.



Nurdin Halid dan Presiden RI ke-4, Megawati Soekarnoputri.

Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, Nurdin Halid juga mendapat beberapa 'tugas khusus'. Di bidang ekonomi rakyat (koperasi), Presiden SBY meminta Dekopin pimpinan Nurdin Halid untuk menjadi pilar ekonomi rakyat. Hasilnya, jumlah unit koperasi berbadan hukum menembus angka 209 ribu koperasi dengan anggota sebanyak 34 juta orang. Mewakili gerakan koperasi Indonesia, Nurdin Halid pun kemudian memberikan penghargaan kepada Presiden sebagai Bapak Penggerak Pembangunan Koperasi Indonesia.



Nurdin Halid memberi penghargaan kepada Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudoyono.

Di bidang sepakbola, Presiden SBY memberikan dukungan penuh kepada PSSI pimpinan Nurdin Halid untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2007, antara lain merenovasi stadion Utama Gelora Bung Karno sesuai standar AFC dengan biaya Rp 100 miliar. Tercatat, 3 kali

Nurdin Halid mendampingi Presiden SBY menonton langsung laga Piala Asia. Presiden SBY juga mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 dengan terbitnya surat pernyataan dukungan pemerintah Indonesia kepada FIFA yang ditandatangani oleh Menko Kesra Aburizal Bakrie pada 20 Mei 2009.

Namun, semua kisah indah itu berakhir tragis. Presiden SBY, melalui Menpora Andi Mallarangeng dan Menko Kesra Agung Laksono, tiba-tiba saja mengirim surat kepada FIFA yang berisi pencabutan dukungan pemerintah Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Pada waktu hampir bersamaan, pemerintahan SBY 'mengadili' Nurdin Halid di Kongres Sepakbola di Malang, yang diikuti pembekuan PSSI oleh Menpora Andi Mallarangeng. Niat Nurdin Halid bersama Nirwan Bakrie maju kembali menjadi ketua umum PSSI coba dihadang, termasuk diperhadapkan dengan duet Kepala Staf Angkatan Darat George Toisuta dan pengusaha Arifin Panigoro. Dua kali Kongres PSSI, di Riau dan Jakarta, pun ricuh dan bubar.

Hubungan Nurdin Halid dengan presiden saat ini, Jokowi, terbilang dekat. Dalam pidato pada Hari Koperasi tahun 2016 di Riau, Presiden Jokowi minta Dekopin pimpinan Nurdin Halid untuk 'menyatukan' bisnis koperasi-koperasi di Indonesia sehingga tercipta skala ekonomi untuk bisa bersaing dengan usaha swasta maupun BUMN/BUMD. Pada Hari Koperasi 2017 di Makassar, Presiden Jokowi memerintahkan Dekopin dan Kementerian Koperasi untuk meniru dan memperbanyak koperasi-koperasi yang sukses, baik di Indonesia maupun di dunia.



Nurdin Halid dan Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Di bidang politik, beberapa kali Nurdin Halid menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara ketika terjadi kisruh dualisme kepengurusan Partai Golkar. Tampilnya Nurdin Halid sebagai Ketua Panitia Pengarah sekaligus pimpinan Munaslub 'rekonsiliasi' Partai Golkar tahun 2016 di Bali tak lepas dari 'restu' Istana. Orang-orang sekitar Presiden Jokowi merekomendasikan Nurdin sebagai sosok yang tepat untuk menyelesaikan konflik Partai Golkar melalui Munaslub rekonsiliasi.